

TAJUK RENCANA

Menimbang Lagi New Normal di DIY

HASIL survei Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM yang menunjukkan sebagian besar warga DIY (60 persen) setuju pemerintah menerapkan new normal disertai protokol yang ketat, memang layak menjadi pertimbangan bagi Pemda DIY dalam mengambil keputusan. Meski demikian, hasil survei tersebut hendaknya bukan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menerapkan kenormalan baru. Terlebih, melihat respon yang disurvei, belum bisa mewakili seluruh masyarakat DIY, mengingat mereka yang mengisi kuisioner adalah warga yang sudah akrab dengan teknologi online, sementara masyarakat yang belum akrab dengan dunia online belum terwakili.

Tentu kita tak hendak mengesampingkan survei tersebut, melainkan perlu melengkapinya dengan realitas sosial menyikapi pandemi Covid-19, misalnya masih banyak warga yang belum disiplin mengenakan masker, menerapkan physical distancing maupun social distancing, serta kebiasaan cuci tangan. Terlebih, survei tersebut hanya mengukur persepsi masyarakat, bukan realitas masyarakat. Padahal, hemat kita, sebelum Pemda DIY mengambil keputusan menerapkan new normal, haruslah sungguh-sungguh memperhatikan realitas masyarakat.

Boleh jadi, mereka yang setuju penerapan new normal telah memiliki disiplin atau kesadaran tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tak terlalu risau dengan ancaman penularan atau penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, mereka juga telah memproteksi diri agar tidak tertular, misalnya dengan selalu memakai masker, tidak berkerumun, serta cukup asupan gizi sehingga imunitas meningkat.

Lantas, bagaimana dengan mereka yang abai terhadap masalah kesehatan dan tak disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19,

mungkin belum tercover dalam survei ini. Terkait itu pula, Pemda DIY menyatakan belum tergesa-gesa untuk menerapkan kenormalan baru. Guru Besar Bidang Kebijakan Publik dan Kependudukan UGM Prof Dr Muhadjir Darwin menyatakan, survei ini belum bisa mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara secara online. Meski begitu, survei tersebut layak untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan (KR 30/5).

Kiranya perlu ditegaskan bahwa persepsi masyarakat DIY tidak berbanding lurus dengan realitas masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, di lapangan masih cukup banyak warga yang abai terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Hemat kita, jauh lebih penting adalah upaya untuk mendisiplinkan warga agar taat pada protokol kesehatan. Bila memang sulit untuk disiplin diri, maka cara paling efektif adalah dengan upaya paksa agar taat protokol. Konsekuensinya, bila melanggar aturan harus dijatuhi sanksi yang tegas, baik berupa denda maupun kurungan.

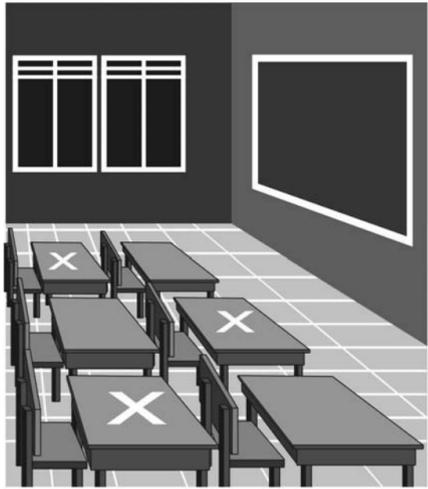
Sejumlah daerah, termasuk di Jawa Tengah, telah menerapkan sanksi administratif berupa denda terhadap mereka yang tidak memakai masker ketika berada di luar rumah, yang besarnya bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu dengan kualifikasi tindak pidana ringan (tipiring). Aturan tersebut tertuang dalam Perda maupun Perbup di masing-masing daerah sebagai payung hukum.

Sementara di DIY, meski semangatnya sama yakni penjatihan sanksi bagi yang melanggar protokol, namun sejauh ini belum cukup efektif, karena lebih banyak bersifat persuasif yakni melalui imbauan. Memang cara ini lebih soft, namun bila masyarakat tetap 'ngeyel', pilihan pendekatan hukum kiranya jauh lebih efektif. □

Pendidikan dalam 'New Normal Life'

Fathur Rahman

Presiden Jokowi telah memberi sinyal akan hadirnya kehidupan normal baru sebagai bentuk penyesuaian atas pandemi global Covid-19 yang tengah terjadi di Indonesia. Meskipun masih bersifat wacana dan terdapat pro-kontra, pemerintah tampaknya serius untuk mempersiapkan strategi *new normal life* dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Hari ini dalam Tajuk Rencana (27/5) bagaimana persiapan DIY dalam menyongsong new normal ditegaskan Sekda DIY, Kadar-manto Baskara Aji.



KR-JOKO SANTOSO

Sayangnya, sektor pendidikan belum cukup tuntas dipantik lebih dalam bagaimana strategi implementasinya. Penyiapan instrumen kehidupan baru dalam pendidikan perlu menjadi perhatian serius. Penyiapan strategi implementasi pola kehidupan baru dalam pendidikan ini setidaknya-tidaknya perlu memperhatikan tiga hal : asumsi data, permasalahan, dan solusi.

Dua Asumsi

Pertama, strategi implementasi dalam bidang ini perlu memperhatikan dua asumsi berikut, yaitu kondisi penyebaran virus dan data jumlah anak-remaja sebagai peserta didik aktif yang terkonfirmasi positif. Berdasarkan tren kasus baru korona di Indonesia, grafik yang dilaporkan juru bicara pemerintah menunjukkan kurva yang cenderung fluktuatif. Setelah sempat turun selama 3 hari berturut-turut, per-27 Mei 2020 kasus baru kembali meningkat.

Dari sisi jumlah anak yang terinfeksi Covid-19, berdasarkan laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia di laman resminya idai.or.id, sebanyak 584 anak di Indonesia terkonfirmasi positif dan 14 anak meninggal dunia. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia. Bercermin dari data tersebut, wacana pember-

akan mengizinkan anak-anak untuk kembali sekolah sampai vaksin tersedia. Duterte khawatir dengan risiko terlalu besar jika anak-anak kembali ke sekolah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, kementerian pendidikan Filipina telah mempersiapkan model kelas online untuk tahun pelajaran berikutnya.

Kedua, penerapan *new normal life* dalam pendidikan di tahun ajaran yang akan segera mulai di bulan Juli 2020 hendaknya perlu didasari atas kajian cepat terhadap berbagai permasalahan

yang menghadang. Beberapa permasalahan yang terdeteksi, di antaranya adalah perbandingan ideal jumlah rombel dengan kapasitas kelas yang tersedia yang sesuai dengan protokol kesehatan, pilihan mode pembelajaran : Apakah murni tatap muka-klasikal ataukah mode *blended-learning* yang memadukan konvensional dan daring? Penyesuaian alokasi waktu pembelajaran, penegakan protokol kesehatan yang ketat, dan dukungan layanan konseling-psikososial.

Lebih Problematis

Dari segi jumlah rombel, kegiatan pembelajaran di sekolah swasta berpotensi lebih problematis, karena jumlah peserta didik yang sangat banyak. Sementara kapasitas ruang kelas tidak memadai jika harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Begitu pula halnya dengan sekolah/madrasah yang mengelola layanan *boarding* atau sekolah berasrama. Jumlah anak dalam satu ruang asrama perlu memperhatikan batasan maksimal kerumunan orang dalam satu ruangan.

Ketiga, setidaknya-tidaknya dari dua problem di atas, pemangku kepentingan dapat menerapkan solusi mode *blended-learning* yang menggabungkan tatap muka dengan mode online dan dapat berimplikasi langsung dengan pergantian jadwal yang bersifat *on-learning* dan *off-learning*. Bagi kelas tertentu yang sedang *off-learning* dapat belajar dari rumah, sedangkan bagi kelas lainnya yang berkesempatan *on-learning* bisa mendalami materi secara konvensional. Kita berharap semoga pendidikan tetap berjalan dan keselamatan jiwa tidak terabaikan. □

**) Fathur Rahman, Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling UNY, Ketua ABKIN DIY dan Pengurus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah DIY.*

Hakim Dibina atau Dibinasakan?

Achiel Suyanto S

PIDATO pertama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru Dr H Syarifuddin SH MH, beberapa waktu lalu cukup memberikan harapan cerah. Pidato di hadapan Pimpinan Mahkamah Agung dan para Hakim Agung RI ini diikuti secara daring oleh para Hakim Tinggi dan Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Harapan cerah bagi dunia penegakan hukum di Indonesia ini tercuat. Dalam pidatonya Syarifuddin bertekad akan berusaha mengembalikan kedudukan MA kepada habitatnya. Yakni sebagai *judex juris* dan akan mendorong penyelesaian perkara selesai hanya sampai tingkat *judex factie*. Artinya setiap perkara yang diajukan pencari keadilan keputusannya diharapkan bisa, memenuhi rasa keadilan masyarakat (progressif). Sehingga bisa diselesaikan hanya sampai di tingkat Pengadilan Negeri atau tingkat Pengadilan Tinggi. Tidak perlu sampai harus ke Mahkamah Agung.

men penanganan perkara. Caranya, dengan melakukan penataan dan pembinaan secara administrasi dan teknis yudisial mulai hulu hingga hilir. Dari hulu, diharapkan akan dilakukan penataan dan pembinaan dengan meningkatkan akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama (PN) dengan meningkatkan kapabilitas hakim dan aparaturnya di tingkat pertama. Hal ini bisa dilakukan dengan terus melakukan pembaruan hukum acara melalui juknis-juknis atau hasil-hasil kajian para Hakim Agung, guna menjamin terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Sedangkan di badan Peradilan tingkat kedua (PT), penataan dan pembinaan penanganan perkara dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengadilan tingkat banding. Sehingga para hakim dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi yang masih dapat diberi pembinaan untuk bekerja lebih baik. Tetapi bagi yang tidak dapat dibina akan dibinasakan, begitu istilahnya.

hukum dan pemberian kemanfaatan. Bukankah itu hakikat dan tujuan dari hukum?

Percepatan Penyelesaian

Adapun penguatan kapasitas dan kapabilitas pengadilan tingkat banding adalah untuk memastikan terjadinya percepatan penyelesaian perkara dengan peningkatan kualitas suatu putusan. Hal ini terkait erat sebagaimana diamanatkan dan dirumuskan dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung. Buku yang membahas sistem pengelolaan organisasi terstruktur yang terdesentralisasi.

Sedangkan dari hilir, penataan dan pembinaan dilakukan dengan upaya mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sesuai hakikatnya sebagai *judex juris*. Tentu dilaksanakan dengan penguatan pelaksanaan sistem kamar dan pemberdayaan pemilahan perkara. Sehingga tidak semua perkara harus bermuara ke Mahkamah Agung. Dan itu pasti akan mengurangi penumpukan perkara di MA tiap tahunnya. □

**) Dr Achiel Suyanto S, Wakil Ketua Umum DPN Peradi.*

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42, Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Mengelola Keuangan dengan Bijak

MENGELOLA keuangan bukan sekadar menulis arus kas dan mengaturnya. Namun lebih dari itu, kita harus mengetahui arah dan tujuan keuangan agar arus keuangan yang kita peroleh serta besarnya pengeluaran tidak lebih dari pendapatan yang kita terima, sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya utang. Bila saldo minus, kita akan sulit untuk menabung ataupun berinvestasi. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, kita harus menentukan tujuan keuangan agar bila suatu saat kita memerlukannya, maka dana tersebut sudah tersedia dan tidak perlu meminjam ataupun utang. Mengelola keuangan dengan bijak adalah syarat mutlak tercapainya tujuan keuangan.

Secara garis besar ada empat macam dana dalam prioritas keuangan keluarga. Yang pertama adalah dana pendidikan, yaitu dana yang diperuntukkan masuk sekolah anak-anak. Dana pendidikan penting disiapkan karena akibat inflasi, uang masuk sekolah akan naik setiap tahunnya. Untuk iuran sekolah misalnya, kita bisa memasukkannya dalam biaya bulanan. Dalam mengantisipasi kenaikan biaya pendidikan, lebihkan tabungan. Untuk mencapai tujuan keuangan dana pendidikan ini, kita bisa memakai cara menabung, asuransi dana pendidikan atau investasi emas.

Yang kedua adalah dana rutin atau bulanan yang mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya bensin, biaya listrik, biaya internet, biaya air, telepon dan sebagainya. Dana rutin ini sebenarnya bisa diatur dan dihambat bila kita berpedoman pada kesederhanaan hidup. Tidak bergaya hidup mewah dan boros. Belanja makanan seperlunya saja dan bijak dalam menggunakan listrik, telepon dan air.

Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk kebutuhan darurat, misalnya saat sakit, saat terjadi bencana alam, atau tiba-tiba terkena PHK. Dana darurat disiapkan sebelum kita mengalokasikan dana untuk

tujuan keuangan. Alasannya, jika kita belum memiliki dana darurat dan sudah mengalokasikan dana untuk tujuan keuangan, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu hal dan kita tidak memiliki dana persediaan, maka kita tentu akan memakai dana yang dialokasikan untuk tujuan keuangan. Ini mengakibatkan tujuan keuangan menjadi terganggu.

Untuk yang keempat adalah dana pensiun. Waktu yang terbaik menyiapkan dana pensiun adalah saat kita muda. Idealnya saat kita masih berusia 25 tahun. Tapi sayangnya, kadang kita merasa pensiun kita masih lama. Padahal semakin panjang waktu untuk tiba di usia pensiun, semakin sedikit biaya yang harus kita sisihkan. Sebaiknya mulai sekarang segera berinvestasi. Semampu kita dan secara berkala kita naikan minimal 10 % setiap tahunnya.

Menyiapkan membeli aset bergerak seperti kendaraan merupakan aset yang nilainya menurun sesuai usia kendaraan. Namun ini diperlukan sebagai alat transportasi menuju tempat kerja. Bila menggunakan kendaraan umum membutuhkan biaya cukup tinggi, maka pertimbangan untuk membeli kendaraan roda dua. Kita bisa membeli dengan cara kredit. Yang perlu dicermati bila hendak kredit kendaraan atau KPR/umah adalah tidak melebihi 30 % penghasilan yang kita dapatkan.

Sebagai alat bantu untuk menghitung tujuan keuangan, kita bisa menggunakan kalkulator pendidikan atau kalkulator dana pensiun yang tersedia di internet. Cari yang paling cocok dan bila memungkinkan diskusikan kepada ahli perencanaan keuangan. Satu lagi, bila belum memiliki dana darurat, jadikan prioritas utama. Pilih prioritas yang paling urgent untuk mencapai tujuan keuangan. Trik yang paling jitu adalah menyisihkan uang setiap bulannya dan disesuaikan dengan kemampuan kita. □

Nur Rahmah Irdianawati SE, Staf Sub Bag Keuangan & Akuntansi RSUD Sleman.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-Perk Kediri Yogyakart, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi M.A. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Ardhi Wahdan. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan :** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklan@kr.co.id, iklan@kr.co.id, iklan@kr.co.id

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Suniaryasih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pojok KR

- KPK luncurkan aplikasi 'Jaga Bansos'.
- Biar tak diintervensi, perlu juga aplikasi 'Jaga KPK'
- ***
- Sempat landai, kasus positif Covid-19 muncul lagi di DIY.
- Tepat bila Pemda DIY tak tergesa terapkan new normal.
- ***
- Presiden ingatkan agenda strategis tak boleh berhenti.
- Memerangi Covid-19, juga harus jadi agenda strategis.

Berabe